

TAJUK RENCANA

Kraton, Sultan HB IX dan UGM

DI DALAM Rapat Kerja Nasional Keluarga Alumni Gadjah Mada (Rakernas Kagama), Sabtu (16/12) Pengda DIY mengusulkan - sebagai keputusan Musda Kagama DIY - agar Kagama memberikan penghargaan khusus kepada Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Penghargaan ini sebagai ucapan terimakasih Kagama maupun Universitas Gadjah Mada (UGM). Usulan yang digodok dengan pemikiran matang mengingat peran Kraton dan Sri Sultan HB IX yang luar biasa.

Tanpa Kraton dan tanpa visionernya Sri Sultan HB IX, sejarah perjalanan pendidikan (tinggi) di Indonesia mungkin tidak seperti sekarang. Maka ketika berbicara mengenai UGM, tidak akan dapat dipisahkan keberadaan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan peran Sri Sultan Hamengku Buwana IX. Harus diakui, Sri Sultan HB IX adalah elite istana dan cendekiawan yang berpandangan demokratis serta luas terhadap kehidupan Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Beliau paham, sebagai negara baru, RI memerlukan lahirnya elite baru untuk memimpin republik.

Peran yang sudah muncul sejak ibukota RI pindah ke Yogyakarta dengan dibentuknya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, dimana Sri Sultan adalah Ketua Kehormatan Dewan Kurator dan wakilnya Ki Hadjar Dewantoro. Fasilitas yang terbatas membuat Sri Sultan meminjamkan kursi dan ruang kuliah di Pagelaran serta Siti Hinggil. Bisa dikatakan, Sri Sultan HB IX adalah penyumbang terbesar bagi eksistensi UGM. Ketulusan ini diikuti kerabat kraton yang dengan ihlas meminjamkan fasilitas bangunan seperti Ndalem Mangkubumen dan Yudonegaran.

Ketika kondisi sudah pulih secara politik pascaagresi Belanda, cita-cita mendirikan universitas nasional

kembali mengggelora. Dan 19 Desember 1949 Universitas Gadjah Mada diresmikan Presiden Soekarno. Sebuah universitas revolusi dengan fasilitas sangat terbatas namun tujuan utamanya mulia : mendidik anak bangsa. Mahasiswa pun berdatangan dari seluruh penjuru tanah air. Karena komitmennya untuk mencerdaskan bangsa, sekali lagi ketulusan dan keikhlasan Sri Sultan HB IX menjadi sulit tertandingi ketika memberikan tanah Sultan Ground (SG) di Bulaksumur dan Sekip.

Bangsa ini harus berterima kasih kepada Sri Sultan HB IX. Bahkan bangsa ini harus mengakui betapa *Ngarsa Dalem* IX sangat visioner melihat perjalanan Bangsa Indonesia yang harus maju lewat pendidikan. Apa yang dihasilkan selama 68 tahun, sudah bisa dilihat. Dan di sini ada sumbangan tak ternilai Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan pribadi Sri Sultan Hamengku Buwana IX sebagai figure nasionalis, republikan, democat sekaligus futuris dan populis.

Untuk merenungkan kembali jasa besar sekaligus kepedulian Sri Sultan HB IX itulah diselenggarakan *niti-laku* dari Pagelaran menuju Bulaksumur. Kegiatan yang disebut Ketua Panitia Dies ke-68 Dr Ir Sunjoto Dip HE berkonotasi spiritual ini untuk merenungkan kembali kepedulian seksual komitmen Sri Sultan HB IX pada dunia pendidikan. Apa yang dilakukan termasuk meminjamkan tempat-tempat di Kraton Ngayogyakarta itu bermakna strategis. Artinya, ilmu yang semula hanya dimiliki segelintir elite lingkup Kraton mulai bisa diikuti masyarakat banyak.

Memahami jasa Kraton Ngayogyakarta dan Sultan HB IX, maka usulan Pengda Kagama DIY harus menjadi pemikiran alumni UGM. Jika bangsa ini selalu mengingat pesan proklamator : *jas merah*, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. □ - e

Mengawal Pembangunan Jalan Tol

Riza Multazam Luthfy

PEMERINTAH mengebut pengerjaan jalan tol se-Indonesia. Sesuai target Presiden Joko Widodo, sepanjang 1.850 kilometer (km) jalan tol diusahakan terbagun pada tahun 2018. Demi mengecek langsung proyek-proyek jalan tol tersebut, presiden sengaja *blusukan*. Selain proses pengerjaan bisa terpantau secara maksimal, hal ini juga dilakukan supaya pembangunan cepat terselesaikan.

Apa yang digencarkan pemerintah patut diapresiasi. Keberadaan jalan tol dipercaya bukan sekadar dapat memperbaiki jalur transportasi. Tetapi juga meningkatkan hasil produksi dalam negeri, serta membuat taraf hidup masyarakat lebih tinggi. Jalan tol berperan besar dalam upaya menciptakan *civil society* dan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Betapa berlangsungnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat terbantu munculnya jalan-jalan tol di berbagai daerah.

Realitas Historis

Demi kelancaran proyek jalan tol, pembebasan lahan merupakan langkah konkrit yang dilakukan pemerintah. Fenomena pembelian tanah untuk memaksimalkan jalannya program pembangunan sebenarnya sudah berlangsung sejak dahulu kala. Salah satunya melalui kebijakan yang dikeluarkan Raja-raja Mangkunegaran masa silam. Catatan sejarah menunjukkan, meskipun tanah-tanah negara telah diserahkan secara tetap kepada desa, akan tetapi dalam hal-hal tertentu para penguasa Mangkunegaran boleh mengambil alih tanah tersebut. Pengambilan tanah bukanlah bentuk kezaliman dan kecongkakan penguasa. Dinilai legal karena dilindungi hukum. Tindakan demikian bermaksud agar negara bisa merealisasikan kepentingan publik dengan tetap memperhatikan asas demokrasi.

Dalam buku *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, Wasino (2008: 165) menyebutkan bahwa pengambilan kembali tanah-tanah desa terjadi jika: (1) Pembebasan lahan diselenggarakan demi kepentingan umum (*mundhut bumi tumrap pa-*



dibentuk oleh Mangkunegara bersama Residen Surakarta bertugas menaksir jumlah kerugian. (2) Pihak kraton memerlukan tanah desa yang akan dialokasikan untuk pengusahan perkebunan.

Adanya ketentuan di atas menunjukkan bahwa hukum selalu berubah mengikuti situasi dan kondisi. Berubahnya zaman menuntut hukum senantiasa memuat gejala-gejala ekonomi, politik, sosial, serta budaya yang berkembang dalam masyarakat. Hukum memberikan atensi dan simpati terhadap apa yang terjadi, baik di dalam maupun di luar manusia.

Utamakan Musyawarah

Bagaimanapun, agar upaya percepatan pengerjaan jalan tol dapat segera terwujud, peme-

rintah membutuhkan tanah desa yang menjadi faktor produksi terpenting bagi rakyat. Kebutuhan negara dalam memanfaatkan tanah desa menuntut adanya penghargaan terhadap orang-orang yang selama ini merawatnya. Pemerintah selayaknya menyadari bahwa dikerjakannya proyek jalan tol dengan mengambil sumber daya lokal meniscayakan dilestarikannya nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Dilaksanakannya berbagai kebijakan pemerintah mesti bertumpu pada ditegakkannya fondasi Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan berlandaskan sila-sila Pancasila, implementasi pembangunan seyogyanya menyerap aspirasi rakyat.

Dalam catatan Yudi Latif (2011: 387-388), adanya kepemilikan bersama berupa tanah menggariskan ketetapan bahwa setiap orang yang ingin memanfaatkannya harus mengantongi persetujuan kaum. Ketentuan demikian mendorong lahirnya tradisi gotong-royong dalam menggunakan tanah yang merembet pada hal-hal lainnya, termasuk urusan pribadi. Adat hidup tersebut menciptakan kebiasaan musyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat. Sebagaimana pepatah Minangkabau: *bulek aei dek pambulah, bulek kato dek mufakat* (bulat air karena pembuluh/bambu, bulat kata karena mufakat).

Semangat inilah selayaknya ditangkap pemerintah. Besarnya jumlah ganti rugi tidak boleh ditetapkan secara yang kurang layak dan cenderung tidak manusiawi. Dicapainya kesepakatan bersama antara masyarakat dengan pemerintah merupakan wujud penghormatan terhadap mereka yang terkena dampak pengerjaan jalan tol yang sudah berkorban demi lancarnya pembangunan. Merupakan suatu tuntutan bahwa dalam menjalankan tugasnya, tim pengadaan lahan mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Di dalamnya antara lain tercantum persyaratan digunakannya tanah desa untuk kepentingan publik. □ - e

*Riza Multazam Luthfy, peneliti desa, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta.

Hari Nusantara dan Abad Samudera Hindia

Boy Rahardjo Sidharta

MEMASUKI usia 60 tahun 'Deklarasi Djuanda' tanpa ada hingar-bingar yang mengiringi. Bahkan terkesan puncak peringatan yang dikenal sebagai 'Hari Nusantara' 13 Desember, tanpa gregat sama sekali. Padahal tanpa Deklarasi Djuanda, mungkin kemerdekaan serta kesatuan dan persatuan Indonesia sangat sulit dipertahankan.

Namun, semangat 'Hari Nusantara' terus digemakan, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bukan tanpa alasan bila selama lima tahun lalu dan lima tahun ke depan Gubernur DIY melandaskan visi pembangunan DIY dengan semangat kelautan-kebaharian-kemaritiman. Sungguh layak kiranya bila dikaji keterkaitan antara 'Hari Nusantara' dan Abad Samudera Hindia.

Budaya Bahari

Sultan Hamengku Buwana X melalui visi Abad Samudera Hindia secara tegas hendak meletakkan kembali budaya bahari dalam membangun DIY. Budaya bahari diwarisi dari semangat Mahapatih Majapahit Gadjah Mada yang berhasil menguasai pulau-pulau di kawasan Indonesia saat ini, bahkan hingga pulau-pulau di kawasan Malaysia dan Filipina. Budaya bahari yang hendak dibangun yakni kemauan untuk mendayagunakan samudera Hindia sebagai 'lahan' untuk memberdayakan masyarakat DIY. Inilah saatnya budaya bahari menjadi 'karakter kunci keistimewaan Yogya'.

Laut sudah menjadi halaman depan bagi warga DIY, tidak lagi dianggap sebagai halaman belakang yang kotor, penuh sampah, dan 'ditakuti'. Warga DIY semakin mewujudkan menjadi masyarakat bahari yang siap menghadapi perjumpaan serta silang budaya di zaman yang semakin cepat berubah ini. Masyarakat bahari yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi kesetaraan, kebebasan, toleransi, keterbukaan, persaudaraan, interkultural, dan multikultural. Yang diharapkan menjelma menjadi masyarakat yang suka berderma, bergotong royong, bekerja keras, jujur, tekun, dan kreatif.

Sultan mengemaskan untuk meraih kembali budaya bahari perlu diterapkan geostrategi jangka

pendek. Geostrategi tersebut dijabarkan antara lain melalui pendidikan berbasis budaya bahari dan meningkatkan kegemaran makan ikan di kalangan masyarakat. Penerapan strategi tersebut diharapkan semakin meningkatkan rasa memiliki dan memanfaatkan secara bijak sumberdaya laut di DIY dan Samudera Hindia.

Koneksi dan Sinergi

Sebagai bagian dari NKRI, DIY wajib mendukung terwujudnya negara maritim yang maju dan berdaulat. Visi Abad Samudera Hindia harus dapat menjadi sarana konektivitas antara pembangunan di kawasan laut DIY dengan poros maritim-tol laut yang telah dicanangkan pemerintah pusat. Dengan demikian, gerak kemajuan pembangunan bidang kelautan-kemaritiman secara serentak akan terwujud di seantero Indonesia.

Visi Abad Samudera Hindia harus sinergis dengan kebijakan pembangunan kelautan-kemaritiman NKRI, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Visi Abad Samudera Hindia memperlihatkan kesadaran

untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk kemaslahatan rakyat. Perlu disusun strategi khusus untuk mencapai hal itu yakni dengan terus-menerus menghilangkan dualisme pusat-daerah, mengikis egosektoral, dan meningkatkan kerja sama antarkementerian, antardinas, antarbidang dan seterusnya.

Strategi lainnya ialah melibatkan generasi muda. Generasi muda seyogyanya dipersiapkan dan dilibatkan sejak dini dengan wawasan kebaharian yang militan dan ketrampilan kebaharian handal. Sehingga mampu bersaing secara global. Isu kelautan di kawasan Asia Tenggara patut dicermati 'generasi zaman now'. Mengingat keterkaitannya de-

ngan kedaulatan dan keamanan laut di kawasan ini yang semakin genting akhir-akhir ini.

Generasi muda DIY harus memahami koneksi dan sinergi pembangunan kelautan-kemaritiman di tingkat propinsi dan di pusat. Mereka juga wajib mendalami sejarah dan semangat perjuangan bahari nusantara, seperti yang dilakukan Djuanda 60 tahun lalu.

Wasana Kata

Peraayaan 'Hari Nusantara' ke-60 tidak harus gegap-gempita. Sesungguhnya perayaan terpenting yang harus dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran akan luhurnya budaya bahari yang diwariskan para pendahulu, termasuk oleh Ir Djuanda. Semangat 'Hari Nusantara' dalam rangka mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya laut secara lestari telah sejalan dengan visi Abad Samudera Hindia. 'Hari Nusantara' diharapkan mampu memicu munculnya generasi muda yang sadar dan berwawasan budaya bahari Indonesia. □ - e

*Boy Rahardjo Sidharta MSc Lektor Kepala bidang Bioteknologi Kelautan, Fakultas Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta; Koordinator Penelitian Terapan Konsorsium Mitra Bahari Regional Center DIY.

Pojok KR
Ribuan orang mengikuti Nitalaku UGM
-- Berkonotasi spiritual bermakna strategis
Gempa membuat sebagian Jateng porak-poranda
-- Semoga tidak membawa korban jiwa
Moratorium izin hotel baru hingga Desember 2018
--Mengendalikan 'tanaman beton'

Pikiran Pembaca
Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax: (0274) 563125 Telp: (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email: pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikutan nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Stasiun Maguwo Bukan Yogya

BANYAK orang mengira atau menganggap Stasiun Maguwo itu adalah Stasiun Yogya. Pada tingkat tertentu, anggapan ini benar karena ia berada di wilayah DIY. Secara administratif Maguwo berada di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Jadi Maguwo itu tidak identik dengan Yogya kalau masalahnya adalah mengenai kota atau kabupaten. Tapi tulisan ini tidak membicarakan mengenai kedua hal itu. Hal yang dibicarakan adalah stasiun kereta api, yakni Stasiun Maguwo dan Stasiun Yogya.

Stasiun Maguwo itu bukan Stasiun Yogya karena Stasiun Yogya hanya meliputi Stasiun Lempuyangan dan Stasiun Tugu yang masing-masing berada di Kota Yogya. Sedangkan Stasiun Maguwo tidak berada di Kota Yogya karena berada di Kabupaten Sleman.

Apa yang saya uraikan di atas baru saya pahami ketika tiket KA Prameks yang saya pesan di Stasiun Maguwo, Jumat, 8 Desember 2017, pukul 10.39, untuk keberangkatan Sabtu, 9 Desember 2017, pukul 12.46, tujuan Solo, ternyata ditolak oleh sistem komputer ketika tiket itu saya gunakan untuk check in di Stasiun Tugu. Berkali-kali petugas juga mencoba menggunakan scanner untuk membaca bar code di tiket saya tersebut, tapi selalu gagal.

Petugas jaga itu kemudian membaca tiket secara cermat (manual) dan diketahui bahwa tiket itu dibeli di Stasiun Maguwo. Lalu ia menjelaskan bahwa tiket dimaksud hanya bisa digunakan untuk check in di Maguwo saja dan tidak bisa digunakan di Yogya. Untuk meyakinkan saya atas hal itu ia dibantu oleh petugas keamanan. Ia mempersilakan saya untuk membeli tiket baru tujuan Solo di Stasiun Tugu jika saya bersikukuh untuk check in melalui stasiun ini. Mendengar keterangan itu, saya langsung

menuju loket perjalan tiket di Stasiun Tugu. Keputusan ini saya ambil karena tidak mungkin saya pergi menuju Stasiun Maguwo hanya untuk check in mengingat waktu keberangkatan KA Prameks ke Solo yang sudah makin dekat.

Dari loket itu saya berhasil mendapatkan tiket baru dengan harga sama dengan yang saya beli di Stasiun Maguwo, yakni Rp 8.000 dengan rute Yogya-Maguwo yang dapat ditempuh dalam waktu 14 menit.

Sebelum KA Prameks meninggalkan Stasiun Tugu, saya bertanya kepada kondektur, apakah saya harus turun dulu ketika sampai di Stasiun Maguwo mengingat tiket yang saya beli di stasiun ini berlaku hanya sampai Maguwo saja, dan setelah itu saya check in lagi untuk meneruskan perjalanan hingga Solo?

Setelah memahami kasus saya dengan membaca kedua tiket di tangan saya, kondektur menjawab bahwa saya tidak perlu turun di Maguwo dan bisa langsung meneruskan perjalanan hingga Solo. Kondektur sempat berkommentar bahwa kasus saya ini menarik. Lalu saya katakan padanya bahwa sebaiknya masyarakat dibuat tahu dan paham, entah bagaimana caranya, bahwa Maguwo itu bukan Yogya.

Hal yang saya maksudkan adalah tiket yang dibeli di Stasiun Maguwo tidak bisa digunakan untuk check in di Stasiun Tugu maupun Stasiun Lempuyangan. Demikian pula sebaliknya sehingga jangan sampai terjadi lagi ada penumpang yang harus membeli tiket dua kali (Rp 16.000) untuk satu perjalanan dari Yogya ke Solo seperti yang saya alami ini. □ - e

Muhammad Ishom
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU)
Surakarta.

Merawat Lingkungan

PRESIDEN Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Gunungkidul, DIY dan Pacitan, Jawa Timur (8/12/2017). Di Desa Karangasem, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Presiden Joko Widodo menghadiri acara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2017.

Kunjungan ini mempunyai banyak makna yang bisa menjadi teladan kita bersama. Salah satunya gerakan menanam pohon yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap pelestarian lingkungan. Sebab selama ini masih banyak di antara kita yang kurang peduli dengan lingkungan sekitar.

Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak, di antaranya pertama, pemerintah daerah harus tetap bersinergi dengan masyarakat untuk terus mengkampanyekan pentingnya merawat lingkungan. Bila perlu pemerintah daerah bisa memberikan sanksi hukum bagi masyarakat yang terbukti membuang sampah sembarangan atau merusak lingkungan. Sebab penegakan hukum yang keras dan tegas adalah kunci keberhasilan merawat lingkungan. Rohana Mahasiswa Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogya.

Kedua, mengintensifkan kampanye merawat lingkungan dengan memelihara kelestarian dan eksistensi pohon di sekitar kita kepada masyarakat. Penyeruluhan ini merupakan edukasi kepada warga untuk turut aktif menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, kampanye ini ditujukan agar memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya usakny lingkungan termasuk dampak buruk membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, agar bencana banjir dan tanah longsor tidak terjadi lagi di wilayah Yogya, kita berharap pemerintah daerah bersama masyarakat dapat terus membunikan kampanye merawat lingkungan melalui gerakan bulan menanam nasional di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya agar bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan tidak kembali terjadi. Semoga dengan gerakan menanam dapat memberikan refleksi kepada masyarakat pentingnya merawat lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana, dan memberikan keadaan yang baik dan nyaman kepada generasi yang akan datang. □ - e

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Antinggota SPS: ISSN: 0852-6496.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Penerbit: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008) Pensiabot: Drs HM Idham Samawi.
Komisaris Utama: Drs HM Romli. Direktur Utama: dr Gun Nugroho Samawi.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH.
Direktur Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Pemimpin Umum: dr Gun Nugroho Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM.
Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Sihono HT, Drs Widyo Suprayogi, Dra Esti Susilarti MPd, Yon Haryono HT, Dra Hj Fadmi Susiati, Dra Prabdandi, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Herry Sugito, Drs Jayadi K Kastari, Sutopo Sgh, M Arief Budiarjo, Subchan Mustafa, Sulistyoto Sutopo, Drs Hasto Sutadi, Eko Boediantoro, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H Chaidir, M Sobirin, Linggar Sumukti, Agung Purwardono, Riyana Ekawati SIKOM, Wahyu Priyanti SH, Ardi Wahdan SPd, Fotografer: Effy Widjono Patro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko.
Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyati.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaidi Raqib, Syaifulah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792-848822. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Surakarta: Jalan Bhayangkara No.13, Surakarta 57141. Telp/Fax (0271) 718015. Kepala Perwakilan: Dra Hermin Lestari, Kepala Biro: Qomarul Hadi.
Banjumas: Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujjyanto SPd.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warditi.
Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502. Kepala Perwakilan: Suniarysh, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Purworejo: Jalan Veteran Blok A Kav. 6, Purworejo Plaza, Telp/Fax (0275) 321848. Kepala Perwakilan: Suprpto SPd, Kepala Biro : Gunarwan.
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suyatno, Kepala Biro: R Agusutata.
Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Kepala Biro: Y Agus Waluyo .
- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.